



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**SEKRETARIAT JENDERAL**

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMTI PONTIANAK**

- 1 -

<b>NOMOR SOP</b>	: /SJ-IND.6.16/SOP/2013
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 2 September 2013
<b>TGL. REVISI</b>	: -
<b>TGL. EFEKTIF</b>	: September 2013
<b>DISAHKAN OLEH</b>	:  Drs. Muhammad Sabri NIP. 196806011996031002
<b>NAMA SOP</b>	: <b>PENGAJUAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) PENYEDIAAN UANG MUKA PNPB</b>

<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li><li>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</li><li>3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010</li><li>4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</li><li>5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Teknis pencairan dana UP</li><li>2. Memahami Persyaratan pengajuan UP</li><li>3. Memahami Rincian UP</li></ol>

<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
1. SOP PNBP 2. SOP PENGIRIMAN SPM DAN PENGAMBILAN SP2D	1. Laptop dan Aplikasi SPM 2. Kartu KPPN (KIPS)
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) Paling Lambat 1 hari setelah pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dari PPK.	- ADK SPM pada Aplikasi SPM

